

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

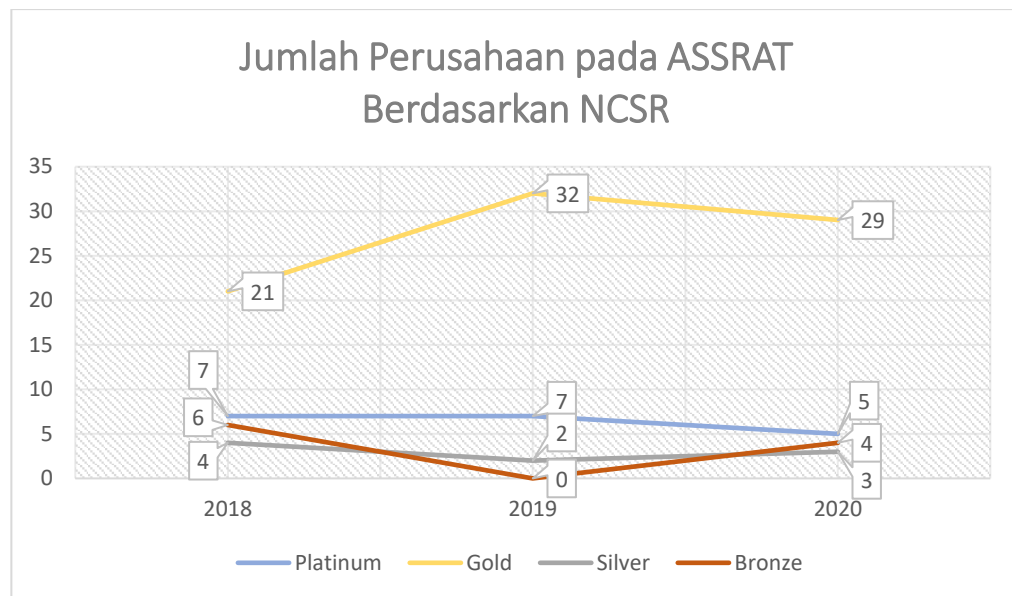
Keberlanjutan merupakan suatu hal yang penting dan sering diperbincangkan pada saat ini, tak terkecuali bagi perusahaan atau organisasi lainnya. Keberlanjutan perusahaan adalah rencana bisnis dinamis dengan mengimplementasikan keberlanjutan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pemegang saham dan melibatkan pemangku kepentingan (Aksoy et al., 2020). Pada perusahaan, keberlanjutan tersebut biasanya dimuat dalam *Sustainability Report* atau Laporan Keberlanjutan. Laporan keberlanjutan adalah laporan yang berisi kinerja dan dampak atas segala hal yang berkaitan dengan keberlanjutan sebuah perusahaan meliputi indikator lingkungan, sosial, dan tata kelola. Keberadaan laporan keberlanjutan dapat membuat perusahaan mengetahui peluang dan risiko yang akan dihadapi atas kegiatan yang dilakukan. Selain itu, dengan adanya laporan tersebut dapat memberikan pengetahuan kepada para pihak yang memiliki kepentingan mengenai kinerja perusahaan, serta melakukan penilaian pertanggungjawaban sosial perusahaan.

Menurut Nikolaou et al. (2019), untuk menilai kinerja keberlanjutan sebuah perusahaan, terdapat tiga kriteria dalam pengelompokannya, yang pertama adalah unit pengukuran yang mencakup pengukuran secara keuangan dan non-keuangan. Kedua, aspek keberlanjutan seperti pendekatan lingkungan, sosial, dan ekonomi atau pendekatan *triple-bottom-line*. Ketiga, indeks yang diusulkan seperti indeks berbasis tunggal atau berbasis gabungan. Dari ketiga kriteria yang telah disebutkan, salah satu kerangka kerja yang digunakan secara luas adalah *Global Reporting Initiative* atau yang selanjutnya disebut GRI. *Global Sustainability Standards Board* merupakan organisasi internasional yang menetapkan standar untuk penyusunan laporan keberlanjutan atau biasa disebut *GRI Standards*. Adapun pedoman GRI terdiri dari beberapa versi yang berbeda setelah mengalami beberapa perubahan diantaranya GRI versi pertama GRI-G1 yang diluncurkan pada tahun 2000, GRI-G2 pada tahun 2002, Gri-G3 pada tahun 2006, GRI-G3.1 pada tahun 2011, GRI-G4 pada tahun 2013, dan yang terbaru *GRI-Standards* pada tahun 2016.

GRI-*Standards* terdiri dari 251 poin pengungkapan yang meliputi indikator lingkungan, ekonomi, dan sosial (GSSB, 2016).

Penggunaan pedoman penyusunan laporan keberlanjutan diharapkan dapat menghasilkan kualitas kinerja keberlanjutan yang lebih baik terutama dalam menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan serta perusahaan dapat mengalami perkembangan yang berkesinambungan. Karena penyampaian kinerja keberlanjutan perusahaan yang berisikan pertanggungjawaban dalam hal sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Dalam peraturan tersebut terdapat kewajiban bagi perusahaan melakukan pertanggungjawaban terhadap sosial dan lingkungan, serta melakukan pelaporan pada laporan tahunan sesuai dengan yang telah diatur pada Pasal 66 Ayat 2 (C). Selain itu, pada tahun 2017 Otoritas Jasa Keuangan juga menerbitkan peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/ 2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan emiten dan perusahaan publik.

Di Indonesia, terdapat sebuah organisasi independen yang bertugas untuk menilai kualitas laporan keberlanjutan pada tingkat asia yang bernama *National Center for Sustainability Reporting*. NCSR awalnya merupakan organisasi yang bertujuan untuk melakukan sosialisasi mengenai sistem pelaporan keberlanjutan, namun kemudian mereka menjadi *partner* dalam melaksanakan pelatihan mengenai laporan keberlanjutan (NCSR, 2021). NCSR lalu menciptakan organisasi profesional untuk keberlanjutan yang disebut dengan “Ikatan Praktisi Keberlanjutan Bersertifikat (IPKB)” yang bertujuan untuk mengembangkan profesionalisme pemegang CSRS, selain itu NCSR juga melaksanakan *Sustainability Reporting Awards* (SRA) pada setiap tahunnya sejak 2005. Pada tahun 2018, SRA berubah nama menjadi *Asia Sustainability Reporting Rating* (ASRRAT). Acara penghargaan ini dilaksanakan agar perusahaan menjadi termotivasi untuk melaporkan keberlanjutan usahanya secara cepat dan sebagai bentuk apresiasi atas segala hal yang telah dijalankan perusahaan untuk melakukan komunikasi berkaitan dengan pengungkapan kinerja perusahaan pada tiga aspek yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial.



Gambar 1. Jumlah Perusahaan pada ASSRAT Berdasarkan NCSR (2021)

Grafik di atas menunjukkan jumlah perusahaan yang ikut serta dalam pelaporan laporan keberlanjutan berdasarkan NCSR. Terdapat 4 (empat) kategori penilaian pada laporan keberlanjutan, yaitu Platinum (tingkat tertinggi), Gold, Silver dan Bronze (tingkat terendah). Pada tahun 2018 terdapat total 38 perusahaan yang melaporkan laporan keberlanjutannya, di antaranya 7 perusahaan pada tingkat Platinum, 21 perusahaan pada tingkat Gold, 4 perusahaan pada tingkat Silver, dan 6 pada tingkat Bronze. Pada tahun 2019 terdapat 41 perusahaan yang melaporkan laporan keberlanjutannya, dengan 7 perusahaan pada tingkat Platinum, 32 perusahaan pada tingkat Gold, dan 2 Perusahaan pada tingkat Silver. Pada tahun 2020, terdapat total 41 perusahaan yang melapor, 5 di antaranya pada tingkat Platinum, 29 perusahaan pada tingkat Gold, 3 perusahaan pada tingkat Silver, dan 4 pada tingkat Bronze.

Perubahan jumlah perusahaan yang melaporkan laporan keberlanjutan pada tiga tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan, namun dapat dilihat adanya inkonsistensi pada penilaian yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Di mana sebelumnya terdapat 7 perusahaan yang berada pada tingkat platinum, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 5 perusahaan. Hal tersebut mengindikasikan adanya penurunan dari kualitas laporan keberlanjutan perusahaan yang mengakibatkan perusahaan tidak berada pada

tingkat tertinggi yaitu Platinum. Selain itu, dilihat dari jumlah perusahaan yang membuat laporan keberlanjutan menggambarkan sedikitnya perusahaan yang menerbitkannya, sedangkan total perusahaan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia sejumlah 803 perusahaan. Menurut Sutadipraja et al. (2020) diungkapkannya informasi mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan dapat berdampak positif jika dilakukan secara transparan, hal ini dapat menarik investor dalam melakukan penanaman modalnya pada perusahaan. Adapun informasi mengenai kinerja keberlanjutan pada perusahaan melingkupi tiga bidang utama yaitu bidang ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pada bidang ekonomi, keberlanjutan membahas mengenai dampak dari kegiatan yang dilaksanakan terhadap kesejahteraan ekonomi yang diperoleh para pemangku kepentingan, internal perusahaan, dan sistem ekonomi nasional (Ahmad et al., 2019). Bidang lingkungan memperlihatkan penggunaan sumber daya alam di lingkungan perusahaan dan mencerminkan pengaruh potensial terhadap keberlangsungan hidupnya (Slaper & Hall, 2011). Bidang sosial ini menggambarkan adanya keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mengakses dan berpartisipasi dalam mencapai tujuan bersama sekaligus mencapai tujuan masing-masing individu (Ahmad et al., 2019).

Pengungkapan dan kinerja keberlanjutan tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya. Menurut Tjahjadi et al. (2021), kinerja keberlanjutan suatu perusahaan dipengaruhi oleh kualitas tata kelola perusahaan dalam pengimplementasian tata kelola yang baik sehingga mendapatkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan. Pada penelitiannya, terdapat empat variabel yang diperkirakan memiliki pengaruh diantaranya ukuran dewan komisaris, pendidikan presiden komisaris, ukuran manajemen tingkat tinggi, dan pendidikan CEO. Sedangkan pada penelitian Erin et al. (2021), terdapat beberapa variabel lain yang mempengaruhi kinerja keberlanjutan perusahaan. Adapun variabel-variabel yang diuji pada penelitiannya adalah ukuran dewan, independensi dewan, perbedaan *gender* dewan, keahlian keuangan dewan, ukuran audit komite, keahlian keuangan audit, serta pertemuan komite audit.

Dari beberapa variabel yang telah diteliti sebelumnya, penelitian ini akan berfokus pada tiga variabel independen yang akan diuji apakah berpengaruh terhadap kinerja keberlanjutan, yaitu ukuran dewan komisaris, keahlian dewan

komisaris, dan pendidikan presiden komisaris. Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota yang terdapat pada susunan komisaris di perusahaan (Husted & Sousa-Filho, 2018). Pada penelitian Erin et al. (2021), diungkapkan bahwa terdapat pengaruh positif yang kuat antara ukuran dewan dan kinerja keberlanjutan yang menunjukkan semakin besar ukuran dewan, maka akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap kualitas kinerja keberlanjutan. Hal ini sejalan dengan penelitian Tjahjadi et al. (2021) yang menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif pada kinerja keberlanjutan. Namun sebaliknya pada penelitian yang dilakukan Shahrier et al. (2018), mengungkapkan bahwa ukuran dewan berpengaruh negatif terhadap kinerja, karena ukuran dewan yang besar menandakan bahwa biaya yang harus dikeluarkan perusahaan juga besar.

Keahlian dewan merupakan kualitas yang dimiliki oleh seseorang baik secara pendidikan, pengalaman, serta usianya. Karena dengan pendidikan yang mumpuni, pengalaman yang banyak, serta banyaknya tahun pada bidang terkait maka dapat berdampak positif terhadap pengungkapan informasi keberlanjutan perusahaan (Erin et al., 2021). Pada penelitian yang dilakukan Erin et al. (2021) dikatakan bahwa keahlian dewan berpengaruh secara positif terhadap kualitas kinerja keberlanjutan, karena dengan keahlian tersebut dewan dapat melakukan pengungkapan informasi laporan keberlanjutan dengan benar dan sesuai. Sedangkan pada penelitian sebelumnya oleh Umukoro et al. (2019), mengungkapkan bahwa keahlian dewan tidak berpengaruh terhadap kinerja keberlanjutan.

Anggota dewan komisaris bisa menjalankan fungsinya dengan efektif jika mereka memiliki kompetensi yang baik, pribadi yang intelek dan pengalaman yang mumpuni. Seseorang yang memiliki pendidikan yang tinggi, apalagi memahami ilmu ekonomi dan bisnis, maka mereka akan mengetahui seberapa penting untuk melakukan pembangunan berkelanjutan dan menjalankan aktivitas yang berhubungan dengan pertanggungjawaban sosial perusahaan (Ratmono et al., 2021). Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Tjahjadi et al. (2021), dapat diketahui bahwa pendidikan presiden komisaris berdampak negatif signifikan terhadap kinerja keberlanjutan. Hal ini karena seseorang dengan latar belakang pendidikan yang tinggi belum tentu memahami situasi sesungguhnya yang

mempengaruhi kinerja perusahaan. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kagzi & Guha (2018). Sedangkan pada penelitian c menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan positif antara pendidikan dewan dengan kinerja keberlanjutan yang menandakan semakin tingginya pendidikan dewan, maka semakin tinggi pula kesadaran mengenai keberlanjutan.

Berdasarkan fenomena yang telah dijabarkan serta hasil dari penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini dilaksanakan untuk melakukan pengujian faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap laporan keberlanjutan perusahaan seperti ukuran dewan komisaris, keahlian dewan komisaris, dan pendidikan presiden komisaris. Pada penelitian ini terdapat beberapa kebaruan yang masih sangat terbatas pada penelitian-penelitian sebelumnya, seperti penggunaan *GRI Standards* sebagai indikator untuk mengukur variabel dependen kinerja keberlanjutan dengan menggunakan tiga aspek yang terdapat di dalamnya (ekonomi, lingkungan, sosial), dimana penelitian sebelumnya masih menggunakan *GRI-G4* yaitu pada penelitian Tjahjadi et al. (2021) dan Umukoro et al. (2019). Pada penelitian yang dilakukan Chams & García-Blandón (2019) dan Umukoro et al. (2019) lebih berfokus terhadap peran *board of directors*, sedangkan pada penelitian ini memfokuskan kepada peran dari *board of commissioner* atau dewan komisaris yang merupakan bentuk penerapan *two-tier system* di Indonesia. Sebagian besar penelitian sebelumnya membahas mengenai latar belakang pendidikan anggota dewan perusahaan, seperti pada penelitian Ratmono et al. (2021), Umukoro et al. (2019), Chams & García-Blandón (2019), Kagzi & Guha (2018), Zhuang et al. (2018), serta Shahrier et al. (2018). Sehingga masih sedikit yang melakukan penelitian mengenai pengaruh dari pendidikan presiden komisaris, Dengan adanya penelitian ini diharapkan terdapat peningkatan rasa tanggung jawab dan kesadaran perusahaan mengenai pentingnya memperhatikan dan memperbaiki kinerja keberlanjutan di perusahaan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, karena hal tersebut dapat membuat perusahaan memperoleh kepercayaan publik kepada perusahaan, sehingga perusahaan dapat mencapai konsep keberlanjutan. Berdasarkan hal tersebut, terdapat ketertarikan dari peneliti untuk mengetahui lebih lanjut dan mendalam mengenai **“Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Keahlian**

Dewan Komisaris, dan Pendidikan Presiden Komisaris terhadap Kinerja Keberlanjutan Perusahaan yang *Listed* di BEI”.

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah dijabarkan pada latar belakang, terbentuk rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keberlanjutan perusahaan (ekonomi, lingkungan, dan sosial)?
- b. Apakah keahlian dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keberlanjutan perusahaan (ekonomi, lingkungan, dan sosial)?
- c. Apakah pendidikan presiden berpengaruh terhadap kinerja keberlanjutan perusahaan (ekonomi, lingkungan, dan sosial)?

I.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan jabaran yang telah diungkapkan pada latar belakang dan perumusan masalah, tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menguji pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja keberlanjutan perusahaan (ekonomi, lingkungan, dan sosial).
- b. Untuk menguji pengaruh keahlian dewan terhadap kinerja keberlanjutan perusahaan (ekonomi, lingkungan, dan sosial).
- c. Untuk menguji pengaruh pendidikan presiden komisaris terhadap kinerja keberlanjutan perusahaan (ekonomi, lingkungan, dan sosial).

I.4. Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat untuk pengembangan keilmuan, pengetahuan, dan pengalaman peneliti serta dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan menjadi alat analisis bagi pembaca, terutama dalam bidang keberlanjutan perusahaan. Peneliti berharap pada penelitian ini mampu menyajikan bukti nyata terkait pengaruh

ukuran dewan komisaris, keahlian dewan komisaris, dan pendidikan dewan komisaris terhadap kinerja keberlanjutan perusahaan-perusahaan di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Investor

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi salah satu faktor bagi investor dalam mempertimbangkan keputusan untuk melakukan investasi dan untuk memahami kondisi serta kualitas kinerja keberlanjutan perusahaan.

2) Bagi Regulator

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi regulator untuk mengevaluasi aturan yang telah ada mengenai kewajiban perusahaan dalam mengungkapkan kinerja keberlanjutannya.

3) Bagi Perusahaan

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat meningkatkan ketaatan perusahaan terhadap peraturan OJK mengenai pengungkapan kinerja keberlanjutan dan dapat menghasilkan kinerja keberlanjutan yang baik di perusahaan.